

**MODEL PEREKRUTAN KAUM PEREMPUAN SEBAGAI KADER
PENGURUS DI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA KABUPATEN
MALAKA**

Rani Amarta Angel Bria¹ Bernardus Seran Kehik²
Raniamarta30@gmail.com, bernardusseran40@gmail.com

¹Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Timor

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendokumentasikan model perekrutan kader perempuan yang digunakan oleh Partai Solidaritas Indonesia dalam upaya meningkatkan partisipasi dan representasi perempuan dalam politik. Kami mengidentifikasi berbagai strategi dan metode yang digunakan oleh partai ini untuk merekrut kader perempuan, mulai dari kuota hingga program pelatihan khusus. Metode penelitian melibatkan analisis data sekunder berupa dokumen partai, wawancara dengan anggota partai, dan survei anggota partai perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Solidaritas Indonesia telah mengadopsi beberapa strategi perekrutan yang berhasil meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai tingkat partai, termasuk posisi kepemimpinan dan pencalonan dalam pemilihan umum. Selain itu, kami menganalisis dampak dari model perekrutan ini terhadap perwakilan perempuan dalam partai dan dampaknya pada perpolitikan lokal. Temuan ini memberikan wawasan yang berharga tentang upaya konkret dalam memperkuat peran perempuan dalam politik dan kontribusi mereka dalam pembuatan keputusan politik. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang strategi perekrutan kader perempuan dalam konteks politik Indonesia, serta memberikan panduan bagi partai politik dan organisasi serupa yang berusaha untuk meningkatkan representasi perempuan dalam politik.

Kata kunci: *Perekrutan Kader Perempuan, Partai Politik, Partai Solidaritas Indonesia, Partisipasi Politik Perempuan, Representasi Politik.*

PENDAHULUAN

Kehadiran perempuan dalam konstestasi politik di Indonesia, baik itu Pemilihan Umum (Pemilu) ataupun Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di daerah semakin terbuka dan berpeluang. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kaum perempuan telah ikut serta dalam meramaikan dan mewarnai dinamika politik di Indonesia. Fenomena ini merupakan kecenderungan yang terus menguat. Sebagai hasil terus menguatnya gerakan dan tuntutan sertameluasnya kesadaran tentang kesetaraan gender atau pentingnya partisipasi perempuan dalam politik. Ruang dan jabatan politik kian terbuka bagi siapa saja. Tidak lagi diperuntukkan secara eksklusif untuk laki-laki dan tidak ditabukan bagi perempuan. Hal politik merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang gender. Konsep kesetaraan gender telah meluas dan berkembang sedemikian rupa sehingga turut berpengaruh pula pada reformasi di Indonesia. Salah satu perubahan yang dilakukan oleh reformasi berkaitan dengan sistem yang bertujuan agar perempuan dapat memperjuangkan kepentingannya dengan lebih nyata di segala bidang, salah satunya adalah dalam bidang politik. Peraturan Perundangan yang ramah terhadap perempuan lahir menjelang pemilu 2004 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum. Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan

bahwa setiap partai politik peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang kurangnya 30%. Empat tahun kemudian, muncul UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa kepengurusan partai politik di tingkat pusat, provinsi serta Kabupaten/kota disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% yang diatur dalam AD dan ART Partai. Hal ini dilakukan agar rekrutmen politik dan proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme yang demokratis dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender UU No 2 Tahun 2008 tersebut dibuat sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa penyertaan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat menjadi salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu dan daftar bakal calon peserta pemilu juga harus memuat paling sedikit 30% Keterwakilan perempuan. Peraturan-peraturan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan sebagai kebijakan afirmatif (*affirmative action*) Keterwakilan perempuan dalam politik. Kebijakan afirmatif adalah langkah-langkah khusus, sementara yang dilakukan untuk mencapai persamaan kesempatan dan perlakuan antara perempuan dan laki-laki.

Berbagai peraturan Perundang-undangan tersebut dalam kenyataan tidak serta merta dapat mendorong partisipasi Politik perempuan. Salah satu indikator rendahnya partisipasi politik perempuan adalah masih rendahnya angka keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik memuat tentang ketentuan kandidasi. Ketentuan ini dibagi atas dua, yakni kandidasi calon legislatif dan kepala daerah. Calon anggota legislatif adalah seseorang yang nantinya akan bertindak untuk mewakili partainya dalam lembaga legislatif yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu). Untuk menjadi calon anggota legislatif, seseorang harus menjalani proses rekrutmen calon anggota legislatif yang sudah ditetapkan oleh partai politik. Tugas utama yang diemban oleh partai politik dalam hal ini adalah menghasilkan calon-calon pemimpin yang berkualitas yang mampu menghadapi mekanisme pemilu nantinya. Calon pemimpin yang mampu menarik simpati dan perhatian masyarakat luas merupakan aset berharga dari partai politik. Orang-orang yang memiliki potensi dan kemampuan perlu diberdayakan (Firmanzah, 2008: 158). Pada umumnya, ada beberapa permasalahan dalam rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik di Indonesia. Partai politik belum memiliki prosedur rekrutmen yang mapan dan cenderung masih bersifat instan serta mengandalkan sistem rekrutmen konvensional yang bergantung pada basis dukungan lama. Ditambah lagi dengan rekrutmen internal dipartai untuk yang sering menyampingkan pertimbangan atas kapasitas, integritas dan pengalaman yang dimiliki oleh calon kandidat. Sebagai partai politik yang baru lahir, Partai Solidaritas Indonesia sudah tentu masih memiliki anggota yang relatif sedikit. Selain berfungsi untuk lolos syarat verifikasi partai politik, anggota menjadi faktor utama setiap organisasi dan merupakan sumber-sumber kaderisasi yang melahirkan calon-calon pemimpin partai politik yang kemudian akan duduk dalam jabatan-jabatan pemerintahan. Maka sebagai partai yang baru lahir tentunya harus melakukan pengkaderan dengan merekrut masyarakat yang ingin aktif dan bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia. Tak terlepas Kabupaten Malaka merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Belu yang disahkan dalam sidang paripurna pada 14 Desember 2012 di gedung DPR RI tentang rancangan undang-undang Daerah Otonomi Baru (DOB). Yang mana daerah ini masih dalam tahap perkembangan, perolehan kursi dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ada di Kabupaten Malaka,

yang mana pada tahun 2019-2024 dari ke-3 daerah pemilihan (Dapil) itu diperoleh 25 kursi yang di tempati oleh partai Golkar dengan perolehan 8 kursi yang membuatnya menjadi peringkat pertama dengan perolehan kursi terbanyak di kabupaten Malaka. Sedangkan Partai Solidaritas Indonesia memperoleh 1 kursi yang mana pada pemilihan priode tahun 2014-2019 Partai Solidaritas Indonesia yang tidak memperoleh kursi di parlemen, dengan fenomena ini apakah adanya keterlibatan kaum perempuan dalam perebutan kursi tersebut ataukah sebaliknya. Dengan demikian penulis akan mengkaji lebih lanjut lagi mengenai MODEL PEREKRUTAN KADER PEREMPUAN DI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA KAB. MALAKA. Dalam teorisasi model perekrutan kaum perempuan sebagai kader Partai PSI yang mana ada beberapa teori sebagai berikut: Feminisme Politik, Pendekatan feminis dalam politik yang mana akan memahami peran gender dalam perekrutan politik dan tantangan yang dihadapi oleh kaum perempuan dalam mencapai posisi kepemimpinan politik. Dan Teori Kesetaraan Gender, Teori ini memeriksa isu-isu kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik. Anda dapat meneliti bagaimana Partai PSI mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kaum perempuan dalam mencapai posisi politik yang signifikan, serta upaya mereka untuk memperjuangkan kesetaraan gender dalam partai dan agenda politik mereka.

METODE PENELITIAN

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni mendeskripsikan tentang kesetaraan gender kaum perempuan dalam rekrutmen partai politik. Pendekatan lebih dari satu pendekatan pengumpulan data memungkinkan evaluator menggabungkan kegiatan dan kebenaran dari suatu sumber data. Hal ini berangkat dari pemaknaan pendekatan penelitian kualitatif itu sendiri dimana metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah fenomenologi yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang telah dialami informan. Masalah yang akan diteliti terkait Kesetaraan Gender Kaum Perempuan dalam Rekrutmen Partai Politik yang ada di Kabupaten Malaka.

SUMBER DATA

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah informan-informan kunci ataupun tokoh-tokoh historis dan yang masih aktif mengelola dan menjadi kader perempuan dalam partai politik yang ada di kabupaten malaka.

Dalam penelitian ini, sumber data primer dapat diperoleh dari pendiri/founding father, mantan-mantan pengurus maupun pengurus yang masih aktif, dan juga beberapa pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pendirian maupun aktivitas internal dan eksternal. Sedangkan data sekunder didapat dari referensi-referensi maupun sumber-sumber data lain yang dapat dipercaya. Dan juga dokumentasi-dokumentasi yang dianggap relevan untuk selanjutnya dapat dianalisis secara lebih mendalam.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk memperoleh data-data yang relevan dengan tujuan penelitian, maka di gunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan sebuah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada tempat penelitian (Nawawi, 1993:100). Dalam metode observasi ini penulis dapat melakukan pengamatan secara langsung pada objek dengan mencari informasi lengkap mengenai

permasalahan Kesetaraan Gender Kaum Perempuan dalam Rekrutmen Kader Partai Politik.

2. Wawancara

Wawancara ini merupakan suatu kegiatan pengumpulan data dengan teknik tanya jawab antara dua orang yang di kerjakan secara sistematis dan berlandaskan suatu tujuan peneliti (Hadi, 1993:193). Teknik tanya jawab berlangsung melalui kontak secara langsung dengan mendatangi lokasi.

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu kegiatan pengumpulan data menggunakan cara mengumpulkan data baik berupa bahan tertulis maupun dalam bentuk gambar yang dapat di ambil untuk memperluas data yang nyata.

TEKNIS ANALISIS DATA

Teknik analisis data dalam penelitian ini di lakukan secara deskriptif kualitatif dan interpretatif untuk mendapatkan suatu makna yang sesuai dengan kajian budaya di harapkan. Pengelolaan suatu data dalam penelitian kualitatif menurut (Nawawi, 1993) adalah suatu proses yang berlangsung serentak. Selanjutnya, berikut ini merupakan langkah-langkah suatu analisis data yang di gunakan (Miles dan Huberman, 1992).

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian atau penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, atau mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data kemudian dapat di simpulkan. reduksi data di lakukan dengan cara membuat ringkasan, membuat data, menelusuri tema, dan membuat sebuah gugus-gugus. Proses transformasi ini akan berlangsung terus sehingga laporan penulis lengkap tersusun.

2. Penyajian Data (*Data Display*) Keputusan yang cocok.

Kecenderungan kognitif manusia adalah menyederhanakan sebuah informasi yang kompleks dan jelas ke dalam suatu bentuk yang dapat di pahami. Hal ini merupakan cara utama untuk menganalisis data kualitatif yang valid.

Penyajian data ini bisa dengan matrik, grafik, atau bagan yang di rancang untuk menggabungkan informasi.

3. Verifikasi Penarikan Kesimpulan

Dari pertama pengumpulan data ini, peneliti mulai mencari makna data yang telah terkumpul. Selanjutnya peneliti ini mencari arti dan penjabarannya. Kemudian menyusun pola-pola hubungan tertentu ke dalam satu kesatuan informasi yang mudah di pahami dan di tafsirkan secara jelas. Data yang sudah terkumpul dan di susun ke dalam satuan-satuan, kemudian di kategorikan sesuai dengan rincian masalahnya. Data tersebut di hubungkan dan di bandingkan antara satu atau dua yang lainnya sehingga mudah di tarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap setiap permasalahan yang ada. Kegiatan analisis data ini merupakan reduksi data, menyajikan, menyimpulkan secara bersamaan yang akan berlanjut dan berulang terus menerus.

FOKUS PENELITIAN

1. Analisis Kebijakan dan Kondisi Organisasi Partai PSI: Meneliti kebijakan dan kondisi organisasi Partai PSI terkait dengan perekrutan kader perempuan. Ini meliputi struktur organisasi partai, kebijakan perekrutan kader, dan komitmen partai terhadap inklusi gender.
2. Tantangan dan Hambatan yang Dihadapi Kaum Perempuan dalam Menjadi Kader Partai PSI Mempelajari tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh kaum perempuan dalam bergabung dan berperan aktif sebagai kader Partai PSI. Ini dapat mencakup kendala sosial, budaya, ekonomi, dan politik.
3. Strategi dan Praktik Perekrutan Kader Perempuan: Menganalisis strategi dan praktik yang digunakan oleh Partai PSI dalam merekrut kaum perempuan sebagai kader. Ini termasuk program-program pelatihan khusus, kebijakan afirmatif, dan upaya untuk meningkatkan kesadaran gender di dalam partai.
4. Persepsi dan Harapan Kaum Perempuan terhadap Partai PSI: Melakukan penelitian untuk memahami persepsi dan harapan kaum perempuan terhadap Partai

PSI. Ini dapat mencakup pandangan mereka tentang inklusi gender, representasi, dan peran mereka dalam proses pengambilan keputusan partai.

5. Rekomendasi untuk Meningkatkan Perekrutan Kader Perempuan Berdasarkan temuan penelitian, menyusun rekomendasi konkret untuk meningkatkan perekrutan kader perempuan dalam Partai PSI. Ini termasuk saran-saran kebijakan, program, dan langkah-langkah strategis lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini telah memberikan wawasan yang mendalam tentang model perekrutan kader perempuan di Partai Solidaritas Indonesia. Dalam pembahasan ini, kita akan merangkum temuan dan implikasi penelitian ini untuk partai politik dan isu kesetaraan gender.

Keterlibatan kader perempuan dalam aktivitas Partai Solidaritas Indonesia penting untuk memastikan representasi yang seimbang dalam pengambilan keputusan politik dan untuk mempromosikan isu-isu yang penting bagi perempuan dalam agenda politik partai. Ini juga dapat menginspirasi perempuan lain untuk terlibat dalam politik dan berperan aktif dalam menciptakan perubahan positif dalam masyarakat.

penelitian ini menunjukkan bahwa Partai Solidaritas Indonesia menerapkan kebijakan kuota perempuan dalam rekrutmen kader. Walaupun belum memenuhi target yang seharusnya, tetapi hal ini mencerminkan komitmen partai terhadap kesetaraan gender dalam politik. Namun, terdapat perbedaan pandangan dalam partai terkait dengan efektivitas kebijakan kuota ini. Sebagian responden berpendapat bahwa kuota perempuan telah berhasil dalam meningkatkan jumlah kader perempuan dalam partai, sementara yang lain merasa bahwa kuota ini masih perlu ditingkatkan dalam implementasinya.

Partai Solidaritas Indonesia telah mengadopsi kebijakan kuota perempuan yang kuat untuk meningkatkan representasi perempuan dalam partai. Hal ini merupakan komitmen yang signifikan terhadap kesetaraan gender

dan telah membantu meningkatkan keterlibatan perempuan dalam partai. Namun, seiring dengan implementasi kuota, partai ini juga perlu memastikan bahwa perempuan yang terpilih untuk posisi penting adalah kualifikasi yang sesuai dan memiliki kapasitas untuk memimpin.

Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa pendekatan yang digunakan dalam pemilihan kader perempuan di Partai Solidaritas Indonesia. Pendekatan yang melibatkan pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, dan mentoring tampaknya efektif dalam mengembangkan kader perempuan yang berkualitas. Sebagian besar kader perempuan yang diwawancarai mengakui manfaat dari pendekatan ini dalam mempersiapkan mereka untuk peran aktif dalam partai.

Dalam penelitian ini menunjukkan juga bahwa program pendidikan politik dan pelatihan kepemimpinan telah berperan penting dalam pengembangan kader perempuan di Partai Solidaritas Indonesia. Hal ini telah membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang ideologi partai, platform politik, serta meningkatkan keterampilan kepemimpinan mereka. Pelatihan yang berkelanjutan dan program pendidikan politik harus diteruskan untuk memperkuat kualitas kader perempuan.

Model mentoring yang diimplementasikan oleh Partai Solidaritas Indonesia merupakan langkah positif dalam memfasilitasi transfer pengetahuan dan pengalaman dari kader senior ke anggota baru. Ini memberikan dukungan yang sangat penting bagi kader perempuan yang sedang berkembang dalam politik. Namun, perlu diperhatikan bahwa program mentoring perlu lebih ditingkatkan dan terstruktur untuk memastikan kelangsungan dan efektivitas mereka.

Penelitian menunjukkan bahwa kader perempuan di Partai Solidaritas Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam berbagai aktivitas partai. Mereka berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, kampanye politik, dan pengorganisasian partai. Beberapa di antara mereka juga berperan sebagai

mentor bagi kader perempuan yang lebih baru bergabung.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa implikasi yang dapat diambil untuk meningkatkan model perekrutan kader perempuan di Partai Solidaritas Indonesia. Rekomendasi termasuk peningkatan transparansi dalam seleksi, peningkatan program pelatihan dan pendidikan politik, dan perluasankerjasama dengan organisasi perempuan. Upaya terus-menerus untuk meningkatkan kesetaraan gender dan mendorong keterlibatan perempuan dalam politik akan menjadi langkah penting dalam menguatkan Partai Solidaritas Indonesia dan mempromosikan kesetaraan gender di tingkat politik yang lebih luas.

Kampanye kesadaran tentang peran kader perempuan dalam politik dan kesetaraan gender sangat penting. Partai Solidaritas Indonesia telah berhasil menggunakan kampanye ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi perempuan dalam politik. Kader perempuan Partai Solidaritas Indonesia juga telah berperan aktif dalam mengkampanyekan nilai-nilai partai, berpartisipasi dalam manajemen kampanye, dan mempengaruhi kebijakan partai. Namun, perlu terus ditingkatkan agar peran mereka semakin kuat dan terdefinisi dengan jelas dalam partai.

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan model perekrutan kader perempuan di Partai Solidaritas Indonesia:

1. Partai Solidaritas Indonesia perlu terus memperkuat implementasi kebijakan kuota perempuan, sambil memastikan bahwa kader yang terpilih memiliki kualifikasi yang sesuai.
2. Program pendidikan politik dan pelatihan kepemimpinan harus terus dikembangkan dan ditingkatkan.
3. Program mentoring perlu diperkuat dan lebih terstruktur untuk memastikan kelangsungan dan efektivitas mereka.

4. Kampanye kesadaran harus terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi perempuan dalam politik.
5. Perlu ada upaya yang lebih besar untuk menetapkan peran kader perempuan Partai Solidaritas Indonesia secara lebih eksplisit dalam partai.

KESIMPULAN

Setelah melalui beberapa proses penelitian kualitatif yang telah diterapkan dan diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Program Partai Solidaritas Indonesia yang mana mereka berkomitmen untuk meningkatkan kualitas Pendidikan, memperluas akses pendidikan, dan mempromosikan literasi. Mereka mendukung transparansi dalam pemerintahan dan penegakan hukum yang kuat terhadap koruptor. Dengan mempromosikan partisipasi aktif Perempuan dalam politik dan masyarakat serta melawan segala bentuk diskriminasi gender. Mereka mendukung Langkah-langkah untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan meningkatkan kesadaran lingkungan, serta memperjuangkan perluasan cakupan asuransi Kesehatan dan peningkatan infrastruktur.
2. Partai Solidaritas Indonesia mengusung nilai solidaritas sebagai dasar dalam menjalankan kebijakan politik mereka. Partai ini menekankan pentingnya keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan tindakan pemerintah. Partai Solidaritas Indonesia mendukung transparansi dalam semua aspek pemerintahan. Dan juga melindungi hak-hak warga negara yang kurang beruntung. Mengutamakan kepentingan yang berpikir segar dan inovatif, program

Langkah awal penting dalam mempromosikan kesetaraan gender dan partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia. Pada masa depan, penelitian lebih lanjut dan pemantauan berkala perlu dilakukan untuk memastikan bahwa upaya ini terus berkembang dan berhasil. Meskipun ada langkah-langkah positif dalam perekrutan dan keterlibatan kader perempuan di Partai Solidaritas Indonesia, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan. Beberapa di antara mereka termasuk resistensi terhadap kuota perempuan, kekurangan sumber daya, dan ketidaksetaraan dalam kesempatan kepemimpinan.

- dan nilai Partai Solidaritas Indonesia mungkin mengalami perubahan dari waktu ke waktu.
3. Partisipasi Perempuan dalam politik di Partai Solidaritas Indonesia merujuk pada keterlibatan aktif Perempuan dalam proses politik, baik sebagai pemilih, pemimpin, atau mengambil keputusan. Partisipasi Perempuan di politik sangat penting untuk memastikan representasi yang lebih baik dan kebijakan yang lebih inklusif. Perempuan yang terpilih membawa perspektif unik mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Pengumuman ini bisa dilakukan melalui situs web partai, media sosial, atau iklan publik. Ini mungkin melibatkan wawancara, penilaian kualifikasi, atau peninjauan rekam jejak politik atau aktivisme mereka. Mereka dapat diberikan hak suara dalam pemilihan internal partai. Pelatihan ini dapat mencakup pengenalan terhadap kebijakan partai, keterampilan komunikasi, manajemen kampanye, dan pemahaman isu-isu politik. Ini dapat melibatkan pelatihan khusus seperti kepemimpinan wanita, negosiasi, atau strategi politik. Keterlibatan kader perempuan dalam aktivitas Partai Solidaritas Indonesia sangat penting untuk memperkuat representasi dan peran perempuan dalam politik. Ini adalah cara untuk memahami lebih baik agenda dan tujuan partai. Keterlibatan kader perempuan dalam aktivitas Partai Solidaritas Indonesia penting untuk memastikan representasi yang seimbang dalam pengambilan keputusan politik dan untuk mempromosikan isu-isu yang penting

bagi perempuan dalam agenda politik Partai Solidaritas Indonesia. Ini juga dapat menginspirasi perempuan lain untuk terlibat dalam politik dan berperan aktif dalam menciptakan perubahan positif dalam masyarakat.

SARAN

Setelah melakukan penelitian terkait Model Perekrutan Kader Perempuan Di Kabupaten Malaka ada pun beberapa saran agar perekrutan kader Perempuan sesuai dengan kuota 30% yang mana sebagai berikut:

1. Lebih berusaha lagi untuk merubah stereotipe masyarakat mengenai budaya patriarki yang ada terhadap kaum Perempuan terkhususnya di kabupaten Malaka sehingga ada perubahan pandangan yang mana kaum Perempuan itu hanya menjadi "ibu rumah tangga" ataupun "mengurus rumah saja"
2. Partai Solidaritas Indonesia bisa lebih mengkampanyekan atau mensosialisasikan serta memberikan pengetahuan tentang berpolitik yang baik dan benar, memberitau apa saja hak dan kewajiban baik sebagai masyarakat ataupun sebagai kader partai sehingga kedepannya lebih baik lagi.
3. Partai Solidaritas Indonesia bisa membuat pendekatan – pendekatan yang lebih efektif lagi seperti memberikan edukasi yang lebih baik dan unik dalam perekrutan kader partai sehingga membuat kesadaran kaum Perempuan yang ada di tengah masyarakat dapat lebih berpartisipasi serta aktif dalam kegiatan politik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Hanafie, Hanihdan Ana Sabanah Azmy.2018, *Kekuatan-kekuatan*

Politik, Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Herimanto dan Winarno, 2012. *Ilmu Sosial&Budaya Dasar*, Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.

Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Mufti, Muslim. 2013. *kekuatan politik Indonesia* Bandung: Pustaka Setia.

Rush, Michael. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Madin silalahi. 2019. "pola rekrutmen calon legislatif perempuan partai politik perindo pada pemilihan umum 2019 di sumatera utara" Dalam *Jurnal Governance Opinion* , Vol. 4 Nomor 1, Tahun 2019 (Oktober) ; 130-149

Rizqi Masykur. 2017` Skripsi "Keterwakilan Perempuan dalam Politik Di Indonesia". (UIN, Jakarta).

Wahyudi. 2018. *Peran Perempuan dalam Perspektif Gender*, vol.1 No.1 mataram: (jan-jun).

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang

Partai Politik.

Undang-undang No.10 tahun 2008 tentang

Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD.